

**KETERPILIHAN PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK LOKAL
(Studi Kasus Wali Nagari Perempuan Pada Nagari Lalang Panjang Inderapura
Kecamatan Air Pura dan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan)**

TESIS



Oleh:

**ANGGIA TRISOLA
NIM 16230002**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

ABSTRAK

Anggia Trisola, 2016/16230002: KETERPILIHAN PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK LOKAL (Studi Kasus Wali Nagari Perempuan Pada Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura dan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan)

Penelitian ini menganalisis keterpilihan perempuan dalam kepemimpinan politik lokal di Sumatera Barat terkait dengan kemunculan perempuan menjadi Wali Nagari di Era Reformasi dengan studi kasus Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura dan Wali Nagari Tapan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan strategi keterpilihan perempuan menjadi Wali Nagari, serta keberterimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam (*In-depth interview*) dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan dalam kepemimpinan politik lokal Nagari mempunyai faktor pendukung diantaranya modal sosial, modal ekonomi dan modal politik. Kemudian kedua kandidat perempuan mempunyai strategi yang bagus dalam memenangkan kompetensi menjadi Wali Nagari, diantara strategi-strategi ini kedua kandidat menggunakan strategi pendekatan kepada masyarakat pemilih dan strategi mengusulkan program yang berbeda dari kompetitor. Secara akseptabilitas kedua kandidat perempuan dapat diterima dan di dukung oleh masyarakat Nagari sehingga terpilihnya perempuan mejadi Wali Nagari.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Wali Nagari, Perempuan

ABSTRACT

Anggia Trisola, 2016/16230002: SELECTION OF WOMEN IN LOCAL POLITICAL LEADERSHIP (Case Study of Wali Nagari Women In Nagari Lalang Panjang Inderapura District Air Pura and Nagari Tapan Basa Ampek Subdistrict Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan)

This study analyze women's election in local political leadership in West Sumatra related to the emergence of women into Wali Nagari in Era Reform with case study of Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura and Wali Nagari Tapan. The purpose of this study is to identify and describe the supporting factors and strategies of women's election to Wali Nagari, as well as the public acceptance of women's leadership.

This research uses qualitative method with case study approach. Selection of informants is done by Purposive Sampling technique. Collected through observation, in-depth interview and documentation study. Test data validity using triangulation of data source. Data analysis used is data reduction, data display, and conclusion.

The finding of this study indicate that women's elections in local political leadership of Nagari have supporting factors such as social capital, economic capital and political capital. Then both women candidates have a good strategy in winning the competence of being a Wali Nagari, between these strategies the two candidates use the approach strategy to the voting community and the strategy of proposing a different program from the competitor. Acceptance of both women candidates can be accepted and supported by the Nagari community so that the election of women becomes Wali Nagari.

Keywords: Leadership, Wali Nagari, Woman

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : **ANGGIA TRISOLA**

NIM : 16230002

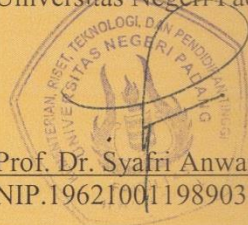
Nama	Tanda Tangan	Tanggal
------	--------------	---------

Dr. Fatmariza, M.Hum
Pembimbing I

Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si
Pembimbing II




Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang



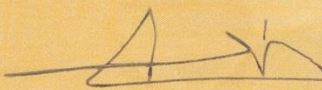
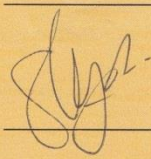
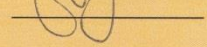


Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP.196210011989031002

Ketua Program Studi
Magister PPKn


Dr. Maria Montessori, M. Ed, M. Si
NIP.196002021984032001

PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS
MAGISTER PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Fatmariza, M.Hum</u> (Ketua)	
2.	<u>Dr. Maria Montessori, M.Ed, Ph.D</u> (Sekretaris)	
3.	<u>Susi Fitria Dewi, S.Sos M. Si, Ph.D</u> (Anggota)	
4.	<u>Dr. Akmal, SH, M.Si</u> (Anggota)	
5.	<u>Selinaswati, S.sos, MA, Ph.D</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Nama : ANGGIA TRISOLA
NIM : 16230002
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2018

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul Keterpilihan Perempuan Dalam Kepemimpinan Politik Lokal (Studi Kasus Wali Nagari Perempuan Pada Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura Dan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak dapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka atau referensi.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 2018

a yang Menyatakan

ggia Trisola

NIM : 16230002

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “*Keterpilihan Perempuan dalam Kepemimpinan Politik Lokal (Studi Kasus Wali Nagari Perempuan Pada Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura dan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan)*”. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.

3. Ibu Dr. Maria Montessori M.Ed., M.Si selaku ketua Jurusan Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis tesis ini.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini..
5. Ibuk Selinaswati S.Sos. MA., Ph.D, ibuk Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D dan Bapak Dr. Akmal, SH, M. S.i selaku Tim Kontributor yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan tesisi ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepastakan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberi izin kepada peneliti untuk meneliti di Nagari Lalang Panjang Inderapura, serta kepada seluruh masyarakat Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dan Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberi izin kepada peneliti untuk meneliti di Nagari Tapan, serta kepada seluruh masyarakat Nagari Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan yang telah membantu dalam penelitian untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Saryusni, serta adekku tercinta Pelia Peltresia dan Nadhira Trivana selalu

memberikan dukungan dan doanya kepada penulis didalam menyelesaikan tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan tesisi ini. Akhirulkalam, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, dan bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin.

Padang, 30 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Teori gender (feminisme)	9
2. Kesetaraan dan keadilan gender	10
3. Konsep gender.....	11
4. Konsep Akseptabilitas, Popularitas, Kapabilitas dan integritas kandidat.....	12
5. Modalitas dalam kontestasi politik.....	15
a. Modal sosial.....	15
b. Modal ekonomi.....	17
c. Modal politik.....	18
6. Strategi kampanye.....	20
a. Pengertian strategi.....	20
b. Political marketing.....	22
7. Strategi politik.....	25
8. Figur kandidat.....	28
9. Teori kekuasaan politik.....	29
B. Penelitian Relevan.....	33
C. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	42
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian	45

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air	
pura.....	45
a. Sejarah Nagari.....	45
b. Letak geografis.....	47
c. Jumlah penduduk.....	48
d. Pendidikan.....	42
e. Mata pencaharian.....	49
f. Keagamaan penduduk.....	50
g. Organisasi pemerintahan Nagari.....	50
h. Lembaga sosial kemasyarakatan Nagari.....	52
i. Profil calon kandidat Wali Nagari	55
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	42
a. Sejarah Nagari.....	58
b. Letak geografis.....	59
c. Jumlah penduduk.....	59
d. Pendidikan.....	60
e. Mata pencaharian.....	61
f. Keagamaan penduduk.....	63
g. Organisasi pemerintahan Nagari.....	64
h. Lembaga sosial kemasyarakatan Nagari.....	65
i. Profil calon kandidat Wali Nagari	69
B. Temuan khusus.....	72
1. Faktor pendukung keterpilihan perempuan menjadi wali nagari.....	72
a. Modal sosial.....	73
b. Modal ekonomi.....	86
c. Modal politik.....	96
2. Strategi perempuan dalam memenangkan kompetensi menjadi wali nagari.....	101
3. Keberterimaan terhadap kepemimpinan perempuan menjadi wali nagari.....	131
C. Pembahasan	139
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Saran	144
C. Implikasi	145
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka konseptual.....	36
2. Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura.....	47
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Tahun 2012 – 2017.....	51
4. Struktur Susunan Lembaga BAMUS Nagari Lalang Panjang Inderapura.....	52
5. Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari Tapan.....	60
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun 2016 – 2022.....	65
7. Struktur Susunan Lembaga BAMUS Nagari Tapan.....	66
8. Baliho Pencalonan Iniswati menjadi anggota DPRD TK.II DAPIL V Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilu 2014.....	99
9. Pembangunan Los Pasar di Kampung Sualang.....	116
10. Pembangunan MKC masyarakat.....	117
11. Pembangunan perbaikan MDA Al-Ikhlas.....	117
12. Pembangunan Rabat Beton Jalan ke MDA Al-Ikhlas.....	119
13. Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) Kampung Sualang.....	120
14. Serah terima bantuan baju untuk siswa-siswi PAUD Andalusia....	120
15. Pelatihan komputer masyarakat Nagari Lalang Panjang Inderapura.....	121
16. Pembukaan jalan baru masyarakat Nagari Tapan.....	126
17. Pembangunan jembatan, pengerasan jalan dan pembangunan gorong-gorong di Nagari Tapan.....	126
18. Rumah bedah rumah ibuk “Wit Asmanita”.....	127
19. Pelatihan kader Posyandu.....	128
20. Pelatihan kelompok tani.....	129
21. Pelatihan PKK.....	129
22. Pelatihan komputer.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Kerangka konsep.....	36
2. Data Informan Penelitian Nagari Lalang Panjang Inderapura	38
3. Data Informan Penelitian Nagari Tapan	39
4. Tingkat pendidikan penduduk Nagari Lalang Panjang Inderapura.....	44
5. Fasilitas sekolah yang terdapat di Nagari Lalang Panjang Inderapura..	49
6. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat	49
7. Jumlah Fasilitas Peribadatan.....	50
8. Data Pelaksanaan Majelis Taklim dan Wirid Yasin Di Nagari Lalang Panjang Inderapura	55
9. Perbandingan Profil calon kandidat Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura	56
10. Data jumlah penduduk Nagari Tapan	61
11. Jenis Mata Pencaharian	61
12. Tingkat pendidikan penduduk Nagari Tapan.....	62
13. Fasilitas sekolah yang terdapat di Nagari Tapan.....	63
14. Jumlah Fasilitas Peribadatan	64
15. Data Pelaksanaan Majelis Taklim dan Wirid Yasin Di Nagari Tapan.....	68
16. Perbandingan Profil calon kandidat Wali Nagari.....	71
17. Harta Kekayaan Calon Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura 2012.....	87
18. Jumlah Dana Kampanye yang dihabiskan oleh calon kandidat Nagari Lalang Panjang Inderapura	88
19. Harta Kekayaan Calon Wali Nagari Tapan 2016.....	91
20. Jumlah Dana Kampanye yang dihabiskan oleh calon kandidat Nagari Tapan	93
21. Program kerja calon Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2012	112
22. Program kerja calon Wali Nagari Tapan Tahun 2016	112
23. Data keberterimaan/dukungan masyarakat terhadap pencalonan kandidat calon Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura	132
24. Data keberterimaan/dukungan masyarakat terhadap pencalonan kandidat calon Wali Nagari Tapan.....	135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Rekapitulasi perolehan suara Pilwana Nagari Lalang Panjang Inderapura dan Nagari Tapan
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Tugas
5. Izin Penelitian
6. Izin Penelitian
7. Keterangan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara hukum perempuan mempunyai hak politik baik ditingkat internasional, nasional maupun lokal. Di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang partisipasi politik perempuan diantaranya : UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marjinal, UU No. 68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki, UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan, dan yang terbaru UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Melalui Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan pusat dengan daerah. Undang-undang tersebut menggambarkan bahwa dinamika pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kendali penuh termasuk dalam pembentukan pemerintahan terendah di daerah berdasarkan asal usul budaya masyarakatnya.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2000 yang direvisi menjadi Perda No. 02 Tahun

2007 Tentang Pemerintahan Nagari yang menimbulkan istilah dalam masyarakat Minangkabau yaitu “babaliak ka nagari”. Dalam Perda ini dinyatakan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Nagari, Nagari adalah : Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Otonomi daerah membuka peluang yang besar bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik lokal Nagari. Setelah bertahun-tahun perempuan mulai berkiprah di pemerintahan nagari, nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat mulai dipimpin oleh wali nagari perempuan. Penelitian tentang wali nagari perempuan di Sumatera Barat telah banyak dilakukan diantaranya Iskandar (2011) mengenai keberhasilan perempuan muncul sebagai wali nagari di Era Reformasi, meskipun demikian keberhasilan perempuan ini tidak mudah banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan untuk maju dalam politik, dalam penelitian Jendrius (2014) mengungkapkan bahwasanya perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam menjadi wali nagari sehingga mengakibatkan penghacuran partisipasi politik perempuan. Dalam penelitian Fatmariza (2012) mengungkapkan bahwa kepemimpinan laki-laki cenderung bergeser maknanya mejadi kekuasaan yang mendominasi sehingga tidak jarang menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang rentan terhadap tindak kekerasan, sebagaimana yang dikatakan Utami 2001 (dalam Fatmariza, 2003:30) untuk

mewujudkan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi, karena dengan kesetaraan gender akan membuka peluang serta akses bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan baik laki-laki maupun perempuan untuk ikut serta melakukan proses demokratisasi itu sendiri.

Meskipun upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan oleh cukup banyak pihak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat masih banyak praktek ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan termasuk keterlibatan perempuan dalam politik karena masih adanya budaya patriarki dalam masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu menjadi pemimpin. Hal ini sejalan dalam penelitian Pambudi (2004) bahwa perempuan sulit untuk masuk dunia politik karena melanggengnya budaya patriarki dalam masyarakat dan memberikan pembenaran atas penempatan perempuan dalam ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik. Disisi lain dalam penelitian Zakaria (2013) perempuan dipersepsikan sebagai manusia kelas dua dalam realitas sosial, sehingga adanya istilah “Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan nya kepada perempuan” implikasinya lelakilah yang lebih pantas untuk memegang sebuah perkara karena perempuan masih dianggap sebagai makhluk lemah. Dalam penelitian Wahid (2012) juga mengatakan: sebenarnya kesempatan memang sudah banyak membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik namun kenyataannya perempuan masih belum dipercaya oleh partai politik untuk berkriprah secara terbuka kecuali perempuan tersebut mempunyai kekuatan keuangan, terkenal, dan merupakan keturunan yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat.

Selain Indonesia di beberapa negara perempuan juga sulit berkiprah dalam dunia politik, dalam penelitian Godwin (2013) rendahnya kesadaran politik dikalangan perempuan Nigeria di sebabkan budaya patriarki. Dengan anggapan bahwa laki-lakilah yang sebenarnya lebih pantas dari pada perempuan. Artinya ada nilai-nilai dalam masyarakat bahwa kepantasan laki-laki untuk menjadi pemimpin dari pada perempuan karena perempuan dalam mengambil keputusan sering mempertimbangkan hati dan perasaan. Demikian juga halnya dalam penelitian Daniel (2015) rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam Pemerintah Daerah di Maiha Wilayah Negara Bagian Adamawa masih disebabkan sosio-kultural budaya patriarki masyarakat tentang peran dan budaya perempaan. Dapat dikatakan adanya pembedaan peran dalam masyarakat yang menganggap peran laki-laki berada di wilayah publik sedangkan perempuan di wilayah domestik. Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Fatmariza (2003) dalam gender terjadi pembedaan peran dan wilayah gender. Dalam peran umumnya masyarakat masih menganggap peran laki-laki sebagai pekerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomis/uang, sedangkan perempuan merupakan pekerja reproduktif, misalnya mengelola rumah tangga dan mengasuh anak.

Dari berbagai penelitian terdahulu, penulis melihat masih adanya tantangan dan hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik seperti adanya budaya patriarki yang menimbulkan pembedaan peran wilayah gender. Laki-laki berada diwilayah publik perempuan diwilayah domestik. Dengan pembagian peran wilayah berdasarkan gender maka perempuan akan sangat sulit

secara sosial-kultural untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat publik seperti halnya dalam pemerintahan nagari.

Meskipun demikian ternyata beberapa tahun belakangan di Sumatera Barat cukup banyak perempuan maju menjadi wali nagari dan terpilih. Data menunjukkan jumlah keseluruhan Nagari di Sumatera Barat pada tahun 2017 terdapat 648 Nagari yang tersebar di 11 kabupaten, namun dari sekian banyak Nagari hanya terdapat 12 wali nagari yang dipimpin oleh wali nagari perempuan yaitu wali nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, wali Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, wali Nagari Tanjung Bingkung, Wali Nagari Tigo Balai, Kec. Matua, Kab. Agam dan Wali Nagari Sulik Aia, Kec X Koto Diateh, Kab. Solok, Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Kubung, Kecamatan Lembah Gumanti di Kabupaten Solok, Nagari Tigo balai Kecamatan Matur Kabupten Agam, Nagari Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan, Nagari Salido Sari Bulan Kec IV Jurai, Nagari Koto Rawang, Nagari Lalang Panjang Kec Airpura, dan Nagari Tapan Kec. Basa Ampek Balai Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun banyak kebijakan yang memberi peluang untuk mewujudkan kesetaraan gender tetap saja keterlibatan perempuan dalam politik lokal khususnya dalam pemerintahan nagari masih sedikit dan tidak sebanding dengan laki-laki karena perempuan masih mendapat tantangan dan hambatan untuk maju dalam pemerintahan terendah nagari.

Nagari Tapan dan nagari Lalang Panjang Inderapura merupakan 2 dari 5 nagari di Pesisir Selatan yang dipimpin wali nagari perempuan, dalam proses

pencalonan perempuan-perempuan tersebut mendapat tantangan dan hambatan yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Nagari Lalang Panjang Inderapura saat Pilwana periode 2012-2017 memiliki 4 kandidat calon wali nagari, satu diantaranya perempuan yaitu Linda Sri Ningsih, Linda Sri Ningsih saat mencalonkan wali nagari mengalami kesulitan dibandingkan dengan 3 kandidat laki-laki lainnya. Salah satu syaratnya untuk mengajukan sebagai wali nagari mendapat surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun kandidat Linda Sri Ningsih sulit mendapatkannya karena Linda Sri Ningsih bukan asli dari Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura.

Sedangkan Nagari Tapan saat Pilwana 2016-2022 juga memiliki 5 kandidat wali nagari salah satu diantaranya kandidat calon perempuan yang bernama Iniswati, dimana Iniswati untuk maju dalam pilwana juga mengalami kesulitan saat pencalonan wali nagari salah satu kandidatnya adalah sasuku dengan Iniswati, sehingga perempuan diminta mundur saat mencalonkan wali nagari karena sasuku.

Dari uraian diatas artinya perempuan masih mengalami hambatan dan tantangan yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam dunia politik lokal meskipun pemerintah telah memberi kesempatan bagi perempuan namun faktanya perempuan masih sulit untuk terlibat dalam politik. Penelitian ini untuk melihat mengapa perempuan bisa terpilih menjadi Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura dan Wali Nagari Tapan., padahal perempuan mendapat hambatan dan tantangan untuk maju dalam pemerintahan nagari. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Keterpilihan Perempuan dalam Kepemimpinan Politik*

Lokal (Studi Kasus Wali Nagari Perempuan Pada Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura dan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan)”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah dapat dilihat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Adanya budaya patriarki dalam kehidupan bermasyarakat
2. Masih ada beberapa masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang belum bisa menerima dan meragukan kepemimpinan perempuan
3. Tantangan dan hambatan perempuan untuk menjadi wali nagari relatif lebih berat dibandingkan laki-laki
4. Masih sedikit perempuan menjadi wali nagari atau keterlibatan dalam politik lokal

C. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menjadi pendukung perempuan bisa terpilih menjadi wali nagari Lalang Panjang Inderapura dan wali nagari Tapan?
2. Bagaimana strategi perempuan bisa terpilih menjadi wali nagari Lalang Panjang Inderapura dan wali nagari Tapan?
3. Bagaimana keberterimaan masyarakat terhadap kepemimpinan wali nagari Lalang Panjang Inderapura dan wali nagari Tapan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor pendukung perempuan bisa terpilih menjadi wali nagari Lalang Panjang Inderapura dan wali nagari Tapan
2. Mendiskripsikan strategi perempuan bisa terpilih menjadi wali nagari Lalang Panjang Inderapura dan wali nagari Tapan
3. Mendiskripsikan keberterimaan masyarakat terhadap kepemimpinan wali nagari Lalang Panjang Inderapura dan wali nagari Tapan

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Pengembangan ilmu sosial khususnya politik dan gender terutama keterpilihan perempuan dalam kepemimpinan politik lokal
- b. Pengembangan keilmuan PPKn terutama menyangkut kesempatan warga negara untuk menyatakan pendapat dan partisipasi dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan
- c. Pengembangan penelitian berbasis gender dan politik

2. Secara Praktis

- a. Pengambil kebijakan seperti pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam mengakomodir kesempatan bagi setiap warga negara terjun di bidang politik.
- b. Pemerhati masalah perempuan untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki perempuan dibidang politik.

- c. Masyarakat umum untuk dapat mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya keterpilihan perempuan dalam kepemimpinan politik lokal
- d. Peneliti selanjutnya terutama peneliti dibidang politik dan gender sebagai bahan referensi.
- e. Tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai stigma negatif terhadap kompetensi perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Faktor pendukung perempuan menjadi wali yang mana kedua perempuan didukung modal sosial, karena sama-sama mampu berinteraksi dengan masyarakat dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya sehingga kedua kandidat ini didukung dan diberi kepercayaan oleh masyarakat. Selain itu kedua kandidat perempuan didukung modal ekonomi, karena memiliki suami yang bekerja dan berpenghasilan tetap dan mempunyai anak yang mampu disekolahkan dengan baik dan punya tempat tinggal yang layak, jadi secara ekonomi tidak bermasalah sehingga bisa inten terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu kedua kandidat perempuan juga memiliki modal politik, yang mana kedua kandidat memiliki pengalaman organisasi dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Nagari.
2. Strategi keterpilihan perempuan menjadi wali nagari relatif sama yaitu strategi pendekatan masyarakat pemilih fokus pada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di nagari dan masyarakat mengambang. Kandidat Linda Sri Ningsih melakukan pendekatan dengan cara turun langsung mendatangi rumah masyarakat, mengundang, merangkul, pengenalan dan meyakinkan para pemilih dengan sosok/figur yang dimiliki perempuan serta mensosialisasikan program-program unggulan yang dimiliki oleh

kandidat. Sedangkan kandidat Iniswati dengan cara merangkul, mengelompokan dan memanfaatkan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat sebagai media yang bisa mensosialisasikan kandidat Iniswati. Selain itu kedua kandidat menggunakan strategi mengusulkan program yang berbeda dari kompetitor, kedua perempuan ini memiliki program unggulan yang berbeda yang dijadikan produk politik saat berkampanye.

3. Keterpilihan kedua kandidat perempuan menjadi wali nagari karena secara akseptabilitas kedua perempuan diterima dan di dukung oleh masyarakat Nagari dibandingkan dengan kandidat lawan politiknya. Kedua kandidat perempuan mendapat dukungan dari unsur Bamus dalam bentuk surat dukungan dan juga organisasi kemasyarakatan Nagari dalam bentuk sejumlah tanda tangan. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada kandidat perempuan karena masyarakat Nagari Lalang Panjang Inderapura dan Nagari Tapan telah mengalami perubahan sosial budaya yang begitu cepat sehingga masyarakat dalam memilih pemimpin tidak lagi melihat jenis kelamin laki-laki maupun perempuan namun dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh kandidat.

b. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Lalang Panjang Inderapura dan Nagari Tapan tentang keterpilihan perempuan dalam kepemimpinan politik lokal menunjukkan bahwa terpilihnya kedua kandidat perempuan menjadi wali nagari karena mempunyai faktor pendukung, strategi

yang bagus serta keberterimaan masyarakat terhadap pencalonan wali nagari perempuan.

Dengan demikian implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat :

1. Terpilihnya kedua kadidat perempuan menjadi wali nagari dapat mematahkan mitos di masyarakat bahwa yang menjadi pemimpin tidak harus laki-laki akan tetapi perempuan juga bisa asalkan di dukung oleh modal sosial, ekonomi, politik, dan modal-modal lainnya seperti modal budaya dan modal simbolik
2. Terpilihnya kedua kandidat perempuan menjadi wali nagari dapat memotivasi dan menginspirasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat dalam politik
3. Terpilihnya kedua perempuan menjadi wali nagari menunjukkan terjadinya perubahan sosial masyarakat Nagari, sehingga dalam pencalonan kedua kandidat di terima dan di dukung oelh masyarakat dalam pencalonana.

c. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Di sarankan bagi kandidat perempuan berikutnya yang ingin maju dalam politik sebenarnya tidak cukup dengan modal sosial, ekonomi dan politik saja, namun juga harus didukung dengan modal lainnya seperti modal budaya dan modal simbolik.

2. Di sarankan bagi kandidat perempuan berikutnya yang ingin terlibat dalam politik hendak menggunakan strategi yang efektif dan berbeda untuk menarik simpati masyarakat pemilih.
3. Disaran bagi kandidat perempuan yang ingin maju dalam politik, hendaknya harus di dukung dan diterima oleh semua elemen masyarakat.
4. Disaran kepada masyarakat terutama perempuan agar menjadikan keterpilihan Linda Sri Ningsih dan Iniswati menjadi wali nagari dapat memotivasi perempuan lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan publik karena saat ini perempuan bukan penghalang untuk masuk didunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Artikel

- Al Rafni. 2018. Profil dan Sikap Politik Perempuan Anggota DPRD di Sumbar Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif. *Jurnal DEMOKRASI* Vol. VII No. 2
- _____, Suryanef, Rahmadani Yusran, dan Junaidi Indrawadi. 2008. Marjinalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal DEMOKRASI* Vol. VII No. 1
- Annisa Fitriani. 2015. *Gaya Kepemimpinan Perempuan*. *Jurnal TAPIS* Vol.11 No.2. Diakses 12 Juli 2018
- Dr. Aminchi Daniel. 2015. Factors Influencing Low Level of Women Participation in Literacy Programme in Maiha Local Government Area of. *Journal of Education and Practice* . Vol.6, No.15
- Fatmariza, 2003. Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari. *Jurnal DEMOKRASI* Vol. II No.1
- _____, 2012. Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga (Pandangan Mubalig) . *Jurnal Humanus* Vol. XI No.2 Th. 2012
- Fitria Damayanti. 2015. Peran Kepemimpinan Wanita Dan Keterlibatannya Dalam Bidang Politik Di Indonesia. *Jurnal Aspirasi* Vol. 5 No.2
- Ihemeje Godwin. 2013 The Need For Participation Of Women In Local Governance: A Nigerian Discourse *International Journal Of Educational Administration And Policy Studies* . Vol. 5(4), Pp. 59-66
- Indriani Pallawa. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Pembangunan Kesehatan Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5, No.2
- Israr Iskandar, 2003. Wali Nagari Perempuan di Era Reformasi: Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009. *Jurnal DEMOKRASI* Vol.II No.1